

## PEMBERITAAN KASUS KORUPSI POLITIK DALAM KONSTRUKSI MEDIA

Launa,<sup>1</sup> Felix Tawaang<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno

<sup>2</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

<sup>1</sup>launa2011@gmail.com, <sup>2</sup>faltashome@yahoo.co.id

**ABSTRAK.** Penangkapan pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah—seperti elite politik, anggota DPR atau aparat penegak hukum—oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hanya mampu menguak tabir korupsi politik sebagai praktik sekaligus produk kekuasaan politik, namun berhasil mengonfirmasi korupsi politik sebagai wujud kejahatan yang diinisiasi langsung oleh para aktor negara. Isu korupsi politik akan selalu mendapat porsi liputan luas dalam pemberitaan media massa. Framing media atas teks berita korupsi politik menjadi penting untuk dikaji mengingat konstruksi sosial media atas suatu peristiwa ditengarai memiliki kekuatan dalam mengarahkan opini dan membentuk bingkai persepsi publik. Kajian kualitatif ini berupaya menganalisis pembedaan tempo.co dan kompas.com dalam mengkonstruksi pemberitaan kasus korupsi politik. Kajian ini menggunakan teori framing Murray Edelman (varian analisis teks media berbasis paradigma konstruktivis) dengan metode analisis interpretif, objek kajian media online, subjek kajian teks berita korupsi politik pada kedua laman media online, dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan: konstruksi berita tempo.co dan kompas.com cenderung menunjukkan sikap perlawanan atas isu korupsi politik; keberpihakan aktif kedua media pada upaya penegakkan hukum kasus korupsi politik, kendati kedua media kurang menyorot peran penting KPK.

Kata kunci: konstruksi berita, analisis framing, korupsi politik.

**ABSTRACT.** *The arrest of state officials, both at the central and regional levels—such as political elites, members of the DPR or law enforcement officials—by the Corruption Eradication Commission (KPK), not only was able to reveal the veil of political corruption as a practice as well as a product of political power, but succeeded in confirming political corruption as a form of crime initiated directly by state actors. The issue of political corruption will always receive wide coverage in the mass media coverage. Media framing of political corruption news texts is important to study considering that social media construction of an event is suspected to have the power to direct opinion and form a frame of public perception. This qualitative study attempts to analyze the framing of tempo.co and kompas.com in constructing reporting on cases of political corruption. This study uses Murray Edelman's framing theory (a variant of constructivist paradigm-based media text analysis) with interpretive analysis methods, the object of the study of online media, the subject of the study of political corruption news texts on the two sample online media pages, and documentation data collection techniques. The results of the study show: news constructions tempo.co and kompas.com tend to show resistance to the issue of political corruption; the two media actively take sides in law enforcement efforts in political corruption cases, even though the two media do not highlight the important role of the KPK.*

*Keywords: news construction, framing analysis, political corruption.*

---

### PENDAHULUAN

Sejak reformasi digulirkan pada Mei 1998 lalu, publik nasional terus disuguhkan oleh terpaan pemberitaan media massa terkait pengungkapan berbagai kasus korupsi politik yang dilakukan secara kolaboratif oleh politisi, birokrat, dan aparat penegak hukum. Korupsi politik berciri *state corporatic*, karena diinisiasi oleh para elite politik. Korupsi politik bukanlah jenis kejahatan biasa. Ia telah masuk dalam area kejahatan yang bisa berimplikasi pada kejahatan negara (*state crime*).

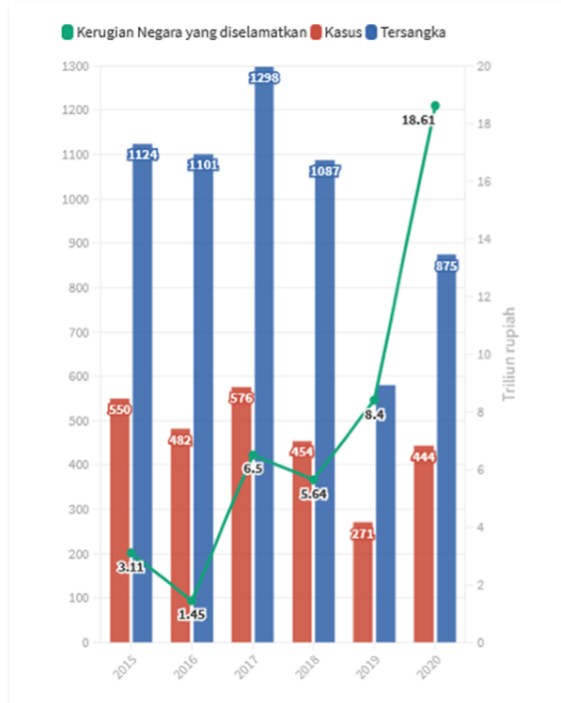
Secara umum, korupsi politik dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, akumulasi dan ekstraksi kapital dimana elite politik/aktor

birokrasi menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih keuntungan dari sektor privat, dari pajak pemerintah atau dari sumber-sumber ekonomi lainnya. Teori *rent-seeking* misalnya, bisa digunakan untuk membaca perilaku politisi atau pejabat publik untuk meraih benefit ekonomi melalui rente politik dengan menebar janji proyek tertentu kepada ‘para pemodalnya’ (Widoyoko, 2018). Kedua, mengambil keuntungan dari sumber-sumber tertentu, seperti pungli atau akumulasi dana publik guna memperkuat posisi kekuasaan/jabatan. Strategi ini biasanya dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum melalui dukungan kebijakan (*patronase*

politik) kepada kelompok ekonomi tertentu melalui redistribusi finansial atau material (Suwarni, 2018). Di ranah empirik, modus korupsi politik juga dapat kita deteksi mulai dari

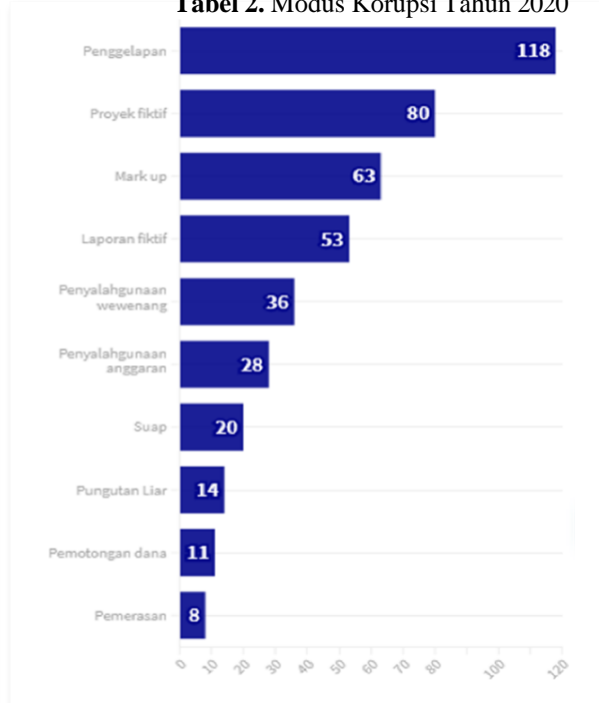
kasus suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi (Ardisasmita, 2006: 4).

**Tabel 1.** Tren Penindakan Korupsi 2015-2020



Source: Jayani (2021)

**Tabel 2.** Modus Korupsi Tahun 2020



Source: Bayu (2020)

Kajian akan diarahkan pada bagaimana tempo.co dan kompas.com mem-framing kasus korupsi politik, yakni berupaya mengungkap fenomena korupsi politik dengan meneliksikan penyajian teks berita dari elemen *kategorisasi*, *ideologi*, *rubrikasi*, dan *klasifikasi*. Kajian ini mengidentifikasi beberapa hal penting berikut: (1) memeriksa unsur framing dalam teks berita atau wacana yang disajikan dalam pemberitaan tempo.co dan kompas.com terkait kasus korupsi politik dilihat dari keempat elemen analisis Edelman (*kategorisasi*, *ideologi*, *rubrikasi*, dan *klasifikasi*); (2) menyingkap makna bahasa dalam praktik bentuk wacana yang bersemayam dalam elemen *kategorisasi*, *ideologi*, *rubrikasi*, dan *klasifikasi*; (3) melihat relasi konstruksi kasus korupsi politik dengan konteks sosial budaya tempat wacana (teks berita) di produksi; (4) menelaah penggunaan pilihan kata, kalimat, istilah, kosa kata, dan gaya bahasa tertentu yang digunakan untuk mengungkap framing seperti apa yang melatari dan ingin dikonstruksi oleh sebuah teks berita terkait kasus korupsi politik

sebagai wujud dari penggunaan bahasa (praktik wacana) yang disajikan tempo.co dan kompas.com; dan (5) elemen bahasa yang hendak dikaji dalam kajian ini meliputi: *kategorisasi* (frame yang digunakan untuk melihat sebuah peristiwa), *ideologi* (penggunaan bahasa, kata, kalimat, wacana dan kaitannya dengan tujuan atau kepentingan tertentu), *rubrikasi* (bagaimana suatu peristiwa dikategorisasikan dalam skema peristiwa tertentu), dan *klasifikasi* (bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dikomunikasikan).

### Konstruksi Kasus Korupsi Politik

Untuk memposisikan *state of the art*, penelitian ini akan mengeksplorasi beberapa topik penelitian terkait isu korupsi politik yang pernah dikaji sebagai wacana dominan. Pertama kajian Sitompul (2014) berjudul: —Konstruksi Realitas Peran KPK dalam Pemberitaan Online Terkait Kasus Korupsi

Studi Framing Beberapa Pemberitaan Online Terkait Peran KPK pada Kasus Korupsi Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Riset kualitatif dengan metode analisis framing Robert Entman mengalisis konstruksi pemberitaan dari tiga portal berita, yakni *tribunnews.com*, *kompas.com*, dan *jawapos.com*. Riset ini menyimpulkan, bahwa dari ketiga portal berita masing-masing mengonstruksi pemberitaan sebagai berikut: (1) konstruksi bingkai militansi peran KPK sebagai opsi oposisi terhadap kekuatan penguasa tidak semata-mata ditujukan pada proses penegakan hukum, namun juga pada nilai-nilai demokrasi; (2) konstruksi bingkai KPK sebagai organisasi non elitis bisa dimaknai sebagai bentuk perlawanan KPK kepada korupsi dan perilaku korup penguasa; (3) secara teoritis dan praktis ketiga portal berita sudah berada pada posisi yang tepat: memberi dukungan pada pemberitaan KPK secara positif sebagai institusi penegak hukum dan penyemai rasa keadilan pada publik.

Kedua, —Konstruksi Media dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi: Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum Kompas Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh (Novita, 2016). Kajian ini menggunakan pendekatan

kualitatif berbasis analisis teks dengan metode analisis framing Robert Entman dan teknik *indepth interview* (yang dikombinasi dengan kontinum teori kritis feminisme radikal versi Kate Millet). Kajian ini bertujuan melihat bagaimana harian *Kompas* melakukan framing terkait pemberitaan kasus korupsi Angelina Sondakh (Angie). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan *Kompas* terkait kasus korupsi Angie tidak solid dan tidak komprehensif, karena menempatkan Angie sebagai aktor tunggal, bukan sebagai korban dari budaya patriarkal yang bias gender. Teks berita *Kompas* lebih banyak menonjolkan sisi feminim Angie sebagai sosok wanita yang lemah, bukan sebagai korban politik partiarki. Angie (dengan latar pendidikan S2 komunikasi) dianggap gagal dalam memberi keteladanan (integritas diri) selaku ‘orang terdidik’ yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen. Secara keseluruhan, framing berita *Kompas* lebih banyak menonjolkan sisi personal Angie—di luar substansi persoalan korupsi yang tengah membelitnya dengan mengeksploitasi sisi feminim Angie dengan tujuan membuat daya tarik berita, namun mengaburkan substansi

kasus hukum yang membelit Angie (delik tindak pidana korupsi).

Ketiga, —Analisis Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan KPK (Prawiradiredja, 2017). Kajian kualitatif dengan metode analisis framing model Zhongdan Pan dan Gerard Kosicki menyimpulkan: *Koran Sindo*, *Kompas*, dan *Surya* menggunakan framing berbeda dalam pemberitaan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan oleh para politisi dan pejabat daerah terkait kasus tindak pidana korupsi tahun 2017. *Koran Sindo* lebih memilih penyajian berita dengan model *report* dalam pemberitaan OTT KPK terhadap empat pejabat di Kota Mojokerto, Jawa Timur. *Kompas* lebih memilih penyajian berita jenis investigasi (pengamatan dan wawancara dengan menonjolkan ultimatum KPK kepada para pejabat pemerintah daerah dalam penggunaan APBD). Sementara harian *Surya* lebih memilih jenis penyajian berita dengan pendekatan humanis (menonjolkan sisi kemanusiaan para pejabat dan elite daerah yang terjerat kasus OTT KPK).

Kempat, —Korupsi dalam Konstruksi Media: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Korupsi di Televisi Swasta Nasional TV One dan Kompas TV (Rivaldi, 2017). Penelitian kualitatif ini bermaksud menelaah aspek makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur terkait wacana pemberitaan korupsi di TV One dan Kompas TV dengan perspektif analisis wacana kritis Teun van Dijk. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan cakap dengan teknik lanjutan simak bebas libat cakap, teknik rekam, teknik catat, dan teknik cakap semuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis struktur teks level makrostruktur menonjolkan topik korupsi pada bagian awal pemberitaan sebagai strategi TV One dan Kompas TV untuk menarik minat pemirsa; pada level superstruktur, TV One dan Kompas TV menggambarkan kecenderungan pola struktur piramida terbalik pemberitaan yang terdiri dari judul, *lead* (intisari berita), dan tubuh berita; pada level mikrostruktur TV One sangat minim menggunakan metafora, sementara Kompas TV cenderung menggunakan metafora pada pemberitaan korupsi (seperti ‘uang panas’, ‘penggelapan dana’, ‘uang haram’, ‘uang pelicin’, dan ‘dalang’). Pada level analisis kognisi sosial, TV One menggunakan skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa dalam mengonstruksi wacana berita korupsi. Sedangkan Kompas TV menggunakan skema persona, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa. Selanjutnya,

pada level dimensi konteks sosial, dalam mengonstruksi wacana korupsi, TV One memberi akses wacana yang lebih besar pada KPK ketimbang pihak koruptor. Sementara Kompas TV cenderung memberi ruang lebih luas dan menonjolkan peran KPK dalam pemberitaan, sehingga terjadi *gap* dalam konstruksi wacana yang tidak seimbang (*unbalance discourse*).

Kelima, —Pembingkai Berita Kasus Suap Patrialis Akbar di Harian Kompas (Affianto, 2018). Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini mendeskripsikan framing pemberitaan kasus suap yang menjerat Patrialis Akbar (PA) selaku Hakim Agung MK di *Kompas* edisi Januari–Februari 2017. Teknik analisis yang digunakan adalah framing model Robert Entman melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, dalam pemberitaannya *Kompas* lebih memberi penekanan pada kasus suap PA yang berdampak signifikan pada pemburuan citra MK di mata publik (*define of problems*). Sumber masalah (*diagnose cause*) adalah orang-orang yang terlibat dengan PA. PA tidak amanah dalam mengemban kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat (*moral judgement*). Adapun solusi (*treatment recommendation*) yang diberikan *Kompas* adalah mendukung pemerintah dan KPK untuk memproses kasus tersebut sampai tuntas; selain memberikan masukan berupa perbaikan sistem dan perbuahan prosedur aturan birokrasi ditubuh MK untuk lebih selektif dalam memilih hakim konstitusi yang memiliki kredibilitas, integritas, dan profesionalitas.

## Teori dan Konsep

**Framing** adalah salah satu metode analisis teks media, seperti halnya analisis wacana, analisis teks, analisis isi (kualitatif), analisis semiotik, analisis naratif, dan jenis-jenis analisis berita berkarakter subjektif, konstruktivistis, dan interpretif teks media lainnya. Setidaknya terdapat sembilan asumsi yang mendasari analisis framing:

1. Framing adalah teknik analisis yang fokus melihat proses pembingkai isu/peristiwa yang dilakukan oleh wartawan/media; sekaligus metode untuk mengetahui teknik apa yang digunakan wartawan saat mengemas isi berita: sisi mana yang disamarkan dan dihilangkan; sisi mana yang akan ditonjolkan atau menjadi penekanan (Eriyanto, 2011).

2. Dalam kajian media, analisis framing umumnya digunakan untuk melihat konstruksi atas framing realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan entitas lainnya) yang dilakukan oleh media massa dengan tujuan, kepentingan, dan motif tertentu. Framing merupakan proses konstruksi (yang melibatkan subjektivitas wartawan), dimana realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, framing berita hanya akan menonjolkan bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, lebih penting, dan dianggap lebih mengena untuk ditembakkan ke dalam benak atau pikiran khalayak (Eriyanto, 2011).
3. Framing berusaha untuk mengingatkan adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih dikenal. Penyajian berita dilakukan dengan cara menekankan peristiwa pada bagian tertentu, menonjolkan sisi tertentu, dan membesarkan isu dengan versi narasi tertentu dari suatu realitas/peristiwa yang ingin dibingkai atau dikonstruksi media (Eriyanto, 2011).

Analisis framing versi Edelman terkait dengan penggunaan bahasa dan simbol-simbol politik dalam aktivitas komunikasi. Edelman memperkenalkan satu metode atau teknik baru dalam analisis framing berita. Menurut Edelman, dalam menganalisis teks berita, sebuah peristiwa dapat dibingkai sesuai dengan apa yang kita tafsirkan; karena realitas sosial potensial diubah dengan cara dimana pengamatan dibingkai dan dikategorikan. Sebuah realitas atau peristiwa yang sama bisa saja menjadi berbeda ketika dibingkai dan dikategorikan secara berbeda. Sebab, apa yang kita lihat, ketahui, pahami, dan maknai tentang suatu realitas atau peristiwa tergantung dari bagaimana kita membingkai, mengonstruksi, dan menafsirkan realitas/peristiwa tersebut (Edelman 1993; Eriyanto, 2011).

Bagi Edelman, framing (atau kategorisasi) adalah sebuah peta konsep yang ada dalam gagasan atau fungsi abstraksi dari pikiran kita, yang membantu kita (sebagai makhluk berpikir dan *homo narrans*) untuk memahami teks peristiwa yang beragam, kompleks, dan rumit menjadi teks peristiwa yang lebih sederhana dan bermakna. Edelman kemudian memperkenalkan empat teknik analisis untuk melihat secara lebih rinci dan mendalam bagaimana sebuah teks berita beroperasi melalui praktik bahasa, yakni melalui teknik analisis di level *kategorisasi*, level *ideologi*, level *rubrikasi*, dan level *klasifikasi* yang beroperasi di ruang teks (pemberitaan)

media (Edelman 1993; Eriyanto, 2011).

*Kategorisasi.* Dalam pandangan Edelman, kategori sangat membantu dalam merumuskan realitas yang dinamis, kompleks, rumit, dan tidak beraturan menjadi realitas yang sederhana, teratur, mudah dipahami, dan bermakna. Kategori (sebagai fungsi abstraksi dari pikiran atau peta konsep yang ada di kepala manusia) adalah frame atau bingkai yang hampir selalu digunakan untuk melihat, memahami, dan memaknai sebuah peristiwa. Melalui kategorisasi, pikiran atau peta konsep individu secara spontan akan menggunakan perspektif tertentu untuk memaknai sebuah peristiwa.

Kategorisasi berfungsi mempengaruhi pikiran dan kesadaran individu dalam memaknai realitas. Kategorisasi mengantarkan individu kepada pengetahuan tentang bagaimana cara mendefinisikan suatu masalah, membatasi ruang lingkup suatu masalah, dan memberikan solusi efektif untuk merekomendasi atau mencari solusi atas penyelesaian suatu masalah (Edelman, 1993; Eriyanto, 2011).

*Ideologi.* Menurut Edelman, kategorisasi berhubungan dengan ideologi. Penggunaan kategorisasi tertentu (seperti korupsi politik atau operasi tangkap tangan) tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis kebahasaan, tetapi lebih dipahami sebagai masalah ideologi. Edelman yakin, khalayak hidup dalam dunia simbolik. Bahasa politik atau hukum yang dipakai dan dikomunikasikan kepada khalayak lewat media mempengaruhi pandangan khalayak dalam melihat dan memaknai realitas. Penggunaan kata atau kalimat tertentu mempengaruhi bagaimana realitas atau seseorang dicitrakan dan pada akhirnya membentuk pendapat umum mengenai suatu peristiwa. Bahasa tertentu memperkuat pandangan seseorang, prasangka, dan kebencian tertentu (Eriyanto, 2011).

Teks berita tidaklah memiliki nilai tanpa merepresentasikan kepentingan, baik dari segi material maupun teknologi. Dari segi material, teks berita media merupakan hasil konstruksi, yang tampil dalam bentuk berita dan kumpulan simbol atau tanda yang berelasi satu sama lain. Dari segi ideologi, teks media merepresentasikan gagasan tertentu yang kemudian dimaknai oleh para pembacanya. Dengan demikian, teks media diproduksi bukan tanpa alasan, mereka di konstruksi secara teknis dan ideologis untuk merepresentasikan gagasan tertentu kepada masyarakat (Burton, 2005).

*Rubrikasi.* Salah satu aspek kategorisasi yang penting dalam pemberitaan adalah rubrikasi. Rubrikasi terkait dengan bagaimana suatu peristiwa (berita) dikategorisasikan dalam rubrik-rubrik tertentu (Eriyanto, 2011).

Rubrikasi adalah perwujudan dari proses kategorisasi pikiran dalam pemberitaan; semacam teknik menempatkan berita (peristiwa/realitas) dalam rubrik (desain) tertentu sesuai dengan kategori media. Bagi Edelman (1993), rubrikasi sangat menentukan bagaimana sebuah peristiwa dinarasikan. Rubrikasi harus dipahami bukan semata sebagai persoalan teknis keredaksian bagaimana sebuah berita ditempatkan, akan tetapi rubrikasi juga harus dilihat bagaimana fakta berita diklasifikasi ke dalam kategori tertentu untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami suatu isu atau peristiwa yang alur narasinya sudah dikonstruksikan oleh wartawan.

*Klasifikasi.* Menurut Edelman, klasifikasi sangat menentukan hadirnya dukungan (*support*) atau ketidaksetujuan (*resistance*) politik media atas satu isu atau peristiwa. Secara teknis, klasifikasi terkait dengan bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dikomunikasikan. Klasifikasi menentukan dukungan (*support*) atau oposisi (*resistance*) pada publik. Hadirnya dukungan atau oposisi publik atas suatu isu atau peristiwa sangat ditentukan oleh bagaimana cara media menyajikan konstruksi (atau framing) pemberitaan kepada publik. Dalam konstruksi pengomunikasian isu atau peristiwa inilah kategorisasi dan klasifikasi bekerja dalam pikiran wartawan/media.

Dengan demikian, analisis framing ingin menunjukkan bahwa setiap berita pada dasarnya memiliki bingkai atau frame) tertentu sebagai hasil konstruksi media (wartawan, editor bahasa, atau redaksi). Peristiwa, realitas atau peristiwa yang sama bisa ditulis, dimaknai, dan disajikan dalam teknik penulisan berita secara berbeda. Realitas/peristiwa korupsi politik misalnya, bisa dinarasikan secara berbeda oleh media, karena setiap media memiliki perspektif (frame) yang berbeda.

Sebagai sebuah teknik menulis berita dan bercerita, frame adalah gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa, yang secara sistematis dan menghadirkan makna dari sebuah peristiwa atau realitas; yang didalamnya memuat dua aspek penting: *‘seleksi isu’* dan *‘penekanan isu’*. Frame (melalui proses seleksi dan penekanan isu) itulah yang nantinya akan menentukan bagaimana peristiwa dilihat, siapa narasumber yang dikutip, bagian dari peristiwa

apa yang ditonjolkan atau ditekankan, dan bagian mana dari peristiwa yang disamarkan, dikucilkan, atau bahkan dihilangkan.

### **Teori Aktor Politik**

Teori aktor politik dan relasinya dengan framing media, maka para pelaku korupsi adalah juga para aktor politik yang memiliki kedekatan dan akses pusat kekuasaan, serta secara aktif bersaing untuk memperebutkan berbagai jabatan dan posisi politik yang ingin diraihnya. Sementara media dilihat sebagai entitas yang berperan dalam menyebarkan frame atas peristiwa politik, sehingga pemaknaan dari peristiwa politik yang dihadapi para aktor politik bisa tersebar luas— dan memberi *impact*—pada kehidupan politik (baca: persepsi dan opini) publik.

Frame atas suatu isu/peristiwa/realitas politik adalah hasil konstruksi yang dilakukan media yang bersumber dari aktivitas/perilaku para aktor politik. Frame yang muncul atas suatu peristiwa politik tidak dipahami sebagai proses alamiah, tetapi dilihat sebagai proses pembingkaihan strategis (*strategic frame*), yakni terkonstruksinya frame sebagai dampak dari pemberitaan media dan relasinya dengan aktivitas politik yang beragam, dinamis, dan menyimpang dari norma moral dan kaidah negara hukum yang berkeadilan. Keberadaan praktek kekuasaan yang korup dan opresif ini terselenggara akibat buruknya budaya politik; dimana budaya politik dikonstruksi para elite sebagai sekedar alat justifikasi dan legitimasi sosial politik penguasa (Alkotsar, 2009).

Penyebab korupsi politik bisa dilatari oleh beragam motif, seperti: (1) penyalahgunaan otoritas yang diinisiasi langsung oleh para penyelenggara kekuasaan negara (pejabat, aktor politik, dan tokoh berpengaruh); (2) tindakan korupsi, sedari awal, dapat dilakukan melalui penggunaan pengaruh (otoritas) politik atau intervensi (kebijakan/regulasi) ekonomi; (3) sebagian uang dari hasil kejahatan korupsi itu digunakan untuk kegiatan yang umumnya terkategori sebagai aktivitas politik (atau kegiatan yang terkait dengan kepentingan pencitraan, legitimasi, dan justifikasi kebijakan); (4) adanya niat (motif) yang dalam bentuk tindakan atau perbuatan tertentu yang dapat dikualifikasi sebagai suatu kepentingan politik; dan (5) interpretasi terhadap pengertian politik, aktivitas politik, dan kepentingan yang ditafsirkan secara eksklusif di dalam berbagai

saling mempengaruhi di antara (para) aktor politik, media, dan khalayak. Artinya, proses framing media tentu tidak berjalan linear, karena saat media membentuk *strategic frame* atas pemberitaan dari aktivitas aktor politik tertentu, para aktor politik sesungguhnya juga memanfaatkan *strategic frame* yang dikonstruksi media—tidak hanya dalam rangka memengaruhi, namun juga menggiring pemikiran yang berkembang dalam benak khalayak.

### **Korupsi Politik**

Korupsi politik (*political corruption*) secara konseptual-teoritis adalah produk dari kurangnya pengawasan hukum, lemahnya kontrol publik, dan menguatnya budaya patronase yang berlangsung intens dalam penyelenggaraan aktivitas kekuasaan (dan konstruksi legitimasi politik) negara. Dalam situasi ini, fungsi negara menjadi tidak efektif. Lemahnya pengawasan hukum dan kontrol publik serta menguatnya budaya patronase ini lahir akibat buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tidak memadai, atau muncul karena praktek kekuasaan politik yang opresif; yang pertimbangan hukum (Alkotsar, 2009).

### **Media Online**

Media *online* adalah sarana komunikasi yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet. Media *online* disebut juga media daring, media digital atau media siber (*cyber media*), yakni semua sarana atau saluran komunikasi yang ada di internet (yang hanya bisa diakses melalui koneksi) sebagai sarana (saluran) komunikasi secara *online*. Media *online* adalah media massa ‘generasi ketiga’ setelah media cetak (*printed media*, seperti koran, tabloid, majalah, buku) dan media elektronik (seperti radio, televisi, dan film/video). Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, *website* (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*), *radio online*, *TV online*, dan email (Romli, 2012).

Media *online* juga kerap disetarakan dengan istilah ‘media sosial’ (*social media*) atau media daring (media yang beroperasi dalam jaringan internet), dimana para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan

menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media *online* (*social media*) merupakan produk jurnalistik online (*cyber journalism*) yang melakukan aktivitas jurnalistik melalui pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Secara teknis atau fisik, media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk dalam kategori media *online* adalah portal, *website* (situs web, termasuk blog), radio *online*, TV *online*, dan email. Sementara isi media *online* terdiri: teks, visual/gambar, audio, dan audio-visual (video) (ProgressTech, 2018).

### **Situs Web (Portal Berita)**

Situs *web* atau *website* yang menjadi pintu gerbang (*starting point*) bagi pengunjung untuk memulai aktivitasnya di internet. Situs *web* atau Portal *web* memiliki perangkat yang menyediakan kemampuan tertentu, yang dibuat sedemikian rupa untuk mengikuti selera para pengunjungnya. Kemampuan portal *web* yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan (*content*) informasi atau berita yang dapat diakses menggunakan beragam perangkat teknologi informasi modern, seperti *personal computer* (PC), komputer jinjing (*notebook*), PDA (*Personal Digital Assistant*), atau telepon genggam (*hand phone*) (id.wikipedia.org, 2020). Sementara portal berita *online* adalah bagian dari *web* portal. *Web* portal bisa berdiri.

### **METODOLOGI**

Penggunaan paradigma konstruktivis dalam kajian ini dilatari oleh pertimbangan relevansi kajian dengan asumsi-asumsi teoritis berikut:

Pertama, ilmu sosial adalah analisis sistematis terhadap tindakan yang berarti secara sosial untuk menciptakan, memelihara, dan mengelola dunia sosial secara bersama (Hidayat, 2003); kedua, menggunakan pendekatan subjektif, yakni melihat realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial (Hidayat, 2003); ketiga, meyakini bahwa setiap individu/kelompok memiliki sifat unik serta mampu memaknai/menafsirkan dunia berdasarkan subjektivitasnya (Creswell, 2014); keempat, memandang realitas sosial secara konstruksionis; yakni realitas sebagai sebuah hasil konstruksi sosial (Neuman, 2016); kelima, memiliki pandangan, keyakinan, dan posisi tersendiri dalam memahami perilaku media (teks berita/wacana) yang dihasilkannya sendiri atau produk konvergensi dari media cetak dan

elektronik. Tempo.co, kompas.com, dan republika.com misalnya, merupakan portal berita jenis konvergensi karena ketiga media tersebut memiliki edisi cetak (koran, tabloid, majalah). Sementara portal berita lain, umumnya tidak berciri konvergensi. Tempo.co dan kompas.com adalah dua *web* portal sampel yang berisi berita dan artikel daring. Saat ini, kedua portal berita menjadi situs berita terpopuler di Indonesia, karena ragam pemberitaannya yang memuat isu-isu politik, sosial, ekonomi, hukum, dan ragam isu lainnya bersifat aktual dan terpercaya. (Eriyanto, 2011); keenam, pekerjaan rutin media massa adalah mengonstruksikan realitas melalui praktik bahasa (Tuchman, 1978; Sobur, 2014); ketujuh, wacana berita tidak terbentuk secara alamiah, namun dipengaruhi oleh beragam faktor interaksi/interrelasi di antara banyak aktor, institusi, dan nilai-nilai sosiokultural yang melingkupinya; dan kedelapan, meyakini bahwa dibalik sebuah teks, narasi atau wacana berita terdapat makna dan citra yang ingin dicapai serta kepentingan tersembunyi yang tengah diperjuangkan (Hamad, 2007).

Melalui cara pandang paradigma konstruktivis, kajian yang fokus pada analisis teks berita (atau wacana) kasus korupsi politik ini diharapkan dapat menyibak framing berita melalui analisis bahasa dan simbol politik seperti apa yang dikonstruksi di ruang teks berita tempo.com dan kompas.com (melalui analisis framing Edelman); berikutnya, mampu menelaah keterkaitan teoritis antara model analisis framing Edelman dengan fenomena korupsi politik sebagai hasil interaksi kekuasaan aktor melalui pengaitan analisis dari teori aktor politik versi Jamil (2014), konsep *authoritarian turn* versi Tom Power (2018), dan konsep *man of contradictions* versi Bend Bland (2020).

Adapun jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretif serta subjek analisis adalah teks berita tempo.co dan kompas.com yang akan ditelaah dari aspek penggunaan bahasa (baik sebagai gejala sosiokultural maupun sebagai representasi ideologi kelompok dominan) ditunjukkan untuk mendapatkan deskripsi (gambaran) dan interpretasi (pemaknaan) secara kualitatif melalui analisis elemen *kategorisasi*, *ideologi*, *rubrikasi*, dan *klasifikasi* dalam proses penyusunan fakta berita. Sementara pendekatan analisis interpretif yang memandang bahwa realitas sosial (teks berita) sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan subjektif, dimaksudkan untuk menilai dan memaknai realitas sosial (baca: berita/wacana) sebagai hasil konstruksi sosial—hasil penafsiran

wartawan atau pemaknaan media— karena perspektif interpretif meyakini wartawan/media adalah individu/institusi yang berkesadaran dan memiliki motif atau kepentingan tertentu dalam bertindak (Rahardjo, 2018).

Subjek analisis dalam kajian ini adalah 4 (empat) teks berita korupsi politik yang tersaji di laman tempo.co dan kompas.com. Keempat teks berita yang menjadi subjek analisis ditentukan kuota samplingnya langsung oleh

peneliti mengacu pada penggunaan teknik sampel purposif (*purposive sampling*), dengan asumsi bahwa keempat teks berita yang digunakan sebagai sampel dianggap cukup representatif mewakili topik pemberitaan kasus korupsi politik dari kedua laman media sampel. Sumber data utama (teks berita) yang digunakan sebagai subjek analisis adalah teks berita kasus korupsi politik yang terbit pada edisi September (3 teks berita) dan Oktober (1 teks berita) 2021.

**Tabel 3.**

Teks Berita Korupsi Politik di laman Tempo.co dan Kompas.com Edisi September-Oktober 2021

Tanggal Terbit	Rubrik	Jam Terbit	Judul Berita
Minggu, 5 September 2021	Nasional	12:28	Fahri Hamzah: Biaya Politik yang Mahal Lahirkan Praktik Korupsi
Senin, 27 September 2021	Nasional	10:22	Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi
Rabu, 29 September 2021	Nasional	09:05	Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi
Jumat, 17 Oktober 2021	Nasional	13:17	Deretan Kasus Korupsi yang Lahir dari Dinasti Politik

Source: Antara (tempo.co); Ramadhan (kompas.com); Margianto (kompas.com); Adyatama (tempo.co).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode koleksi data dokumentatif. Teknik ini diawali dengan pengumpulan data primer (*primary-sources*) berupa teks-teks berita yang bersumber dari kedua portal berita sampel (tempo.com dan kompas.com). Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif (deskriptif-interpretif). Sumber data lain yang digunakan adalah data sekunder (*secondary-sources*), seperti jurnal, buku, dan dokumen serta data tersier (*tertier-sources*), berupa artikel/berita online yang dianggap relevan dengan kebutuhan kajian. Adapun teknik analisis data dokumentatif dilakukan melalui empat tahap berikut: (1) kompilasi dan klasifikasi data; (2) identifikasi dan kategorisasi data (yang disusun ke dalam satuan-satuan analisis); (3) interpretasi dan analisis teks berita (elemen *kategorisasi*, *ideologi*, *rubrikasi*, dan *klasifikasi*), dan (4) penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Melalui perangkat analisis framing Edelman, kajian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut: bagaimana tempo.co dan kompas.com menempatkan kasus korupsi politik dalam teks/wacana pemberitaannya? Siapa aktor yang dijadikan

sumber berita? Pernyataan apa yang ditonjolkan kedua portal berita dari sumber berita tersebut? Bagaimana kedua portal berita menggunakan bahasa (gaya penyajian, kosa kata, diksi, metafor) dalam pemberitaannya? Siapa aktor yang mendapat legitimasi dan delegitimasi dalam pemberitaan? Siapa aktor yang perannya disamarkan, dikucilkan atau bahkan dihilangkan dalam pemberitaan?



**Tabel 4.** Framing Berita 1: —Fahri Hamzah: Biaya Politik yang Mahal Lahirkan Praktik Korupsi

<i>Kategorisasi</i>	—Kelahiran praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih tidak ditentukan kualitas dan kapabilitasnya, tapi „isi tas“ atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana. (p2) —.... tidak mengherankan saat para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal. (p3) —.... hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK. (p4)
<i>Ideologi</i>	—.... mahal nya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia. (p1) —.... kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. (p5)
<i>Rubrikasi</i>	Menempatkan teks berita korupsi politik pada rubrik Nasional
<i>Klasifikasi</i>	—Segera lakukan pembenahan parpol dan sistem demokrasi yang sehat. Parpol sebenarnya adalah lembaga pemikiran untuk mendorong perbaikan dalam penyelenggaraan negara, namun sekarang justru menjelma menjadi mesin kekuasaan. (p6) —.... negara yang beres sistem politiknya harus bebas korupsi, sehingga sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politik. (p8) —.... pembiayaan politik yang mahal bisa disiasati, misalnya (dengan) menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka. (p10)

Source: Antara (teks berita tempo.co, 5 September 2021).

Elemen *kategorisasi*. Pada tabel 4 dengan judul berita: —*Fahri Hamzah: Biaya Politik yang Mahal Lahirkan Praktik Korupsi*, elemen kategorisasi terlihat pada p2, p3, dan p4. Ketiga paragraf teks berita dijadikan kategorisasi yang berfungsi abstraksi dari pikiran atau konsep penulisan berita agar berita lebih sederhana, mudah dipahami, dan bermakna bagi khalayak pembaca. Fungsi abstraksi pikiran (kategorisasi) terlihat dari rangkaian kalimat: “*Kelahiran praktik-praktik korup yang dilakukan para politisi atau pejabat yang terpilih tidak ditentukan kualitas dan*

*kapabilitasnya, tapi „isi tas“ atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana*” (p2); —....*tidak mengherankan saat para politisi atau pejabat terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal* (p3); dan —.... *hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK* (p4).

Kategorisasi berita ingin menunjukkan bahwa biaya politik yang mahal adalah biang keladi dari praktik korupsi politik. Fungsi abstraksi dari kategorisasi berita ini bersumber dari pernyataan Fahri Hamzah/FH (politisi Partai Gelora; eks pimpinan PKS; dan eks anggota DPR RI dari Fraksi PKS) yang dikenal publik sebagai kritikus utama rezim Jokowi.

Tujuan abstraksi (fungsi kategorisasi) bisa dimaknai dalam tiga motif berikut: (1) murni sebagai sikap kritis FH atas kinerja pemerintahan Jokowi dalam konteks negara hukum dan demokrasi; (2) membangun opini publik terkait kinerja pemerintah Jokowi yang gagal mengatasi *high cost politics* dan berdampak pada magnifikasi kasus-kasus korupsi politik; (3) konstruksi citra diri FH dan Partai Gelora yang dipimpinnya sebagai partai baru hasil besutan para eks kader PKS yang belum terlalu dikenal publik.

Elemen *ideologi* terdapat dalam p1: —.... *mahal nya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan partai politik di Indonesia*; dan p5: —.... *kerusakan sebuah negara demokrasi, bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, terutama yang masuk dalam lingkaran kekuasaan*. Pernyataan FH secara simbolik merepresentasikan kepentingan dari gagasan tertentu agar khalayak pembaca memaknai: (1) biaya politik yang mahal adalah bentuk penghancuran demokrasi dan eksistensi parpol; dan (2) masuknya banyak elite parpol ke dalam lingkaran kekuasaan menjadi indikasi utama rusaknya demokrasi (*check and balances*). Dalam teks ini, perilaku parpol dan kekuasaan serta biaya politik mahal dituding sebagai biang keladi

rusaknya demokrasi di era Jokowi (*exclusion*); sementara pada sisi lain, demokrasi—yang digunakan FH sebagai wacana tandingan—dianggap sebagai obat mujarab (*panasea*), namun posisinya terus termarginalisasi (*inclusion*).

Elemen *rubrikasi* ditempatkan tempo.co dalam rubrik Nasional. Penempatan judul (dan narasi) berita pada rubrik Nasional tidak dilatari oleh pertimbangan teknis redaksional semata, namun oleh sebuah pilihan alur narasi (*telling story*) yang akan dikonstruksi media. Tujuannya menggiring opini agar pembaca dapat memaknai judul berita sebagai isu nasional. Penempatan berita dalam rubrik Nasional juga dilatari oleh motif kesepahaman (konsensus) pada pembaca dalam memaknai judul dan isi berita yang disajikan. Pasalnya, isu korupsi politik memiliki urgensi dari sisi kekhususan kasus, juga dari sisi bencana tindak pidana perugian negara yang dihasilkan). Rubrikasi memberi implikasi konseptual untuk membentuk persetujuan khalayak atas makna utama dari teks berita yang

dibacanya. Elemen *klasifikasi*. Klasifikasi berita terlihat pada p6: —*segera lakukan pembenahan parpol dan sistem demokrasi yang sehat*!, p8: —.... *negara yang beres sistem politiknya harus bebas korupsi ...!*, dan p10:.... *pembiayaan politik yang mahal bisa disiasati ...!* Klasifikasi berita menekankan unsur resistensi dan unsur solusi. Dari sisi bahasa, penggunaan diksi —*segera lakukan pembenahan parpol*! atau —*negara yang beres sistem politiknya harus bebas korupsi*! dapat dibaca sebagai motif klasifikasi. Penggunaan kata ‘segera benahi’ dan ‘sistem politik bebas korupsi’ adalah teknik klasifikasi: bagaimana teks berita dipahami dengan memberi penonjolan diksi tertentu pada persepsi pembaca. Tujuan klasifikasi adalah membentuk sikap oposisi (*public resistance*) pada parpol korup yang telah merusak demokrasi dan sistem politik negara. Sebab, ada tidaknya dukungan atau perlawanan publik terhadap satu isu, sangat ditentukan oleh bagaimana media mengklasifikasi berita melalui pilihan kata (diksi), frasa, sturktur kalimat, dan penyajian fakta-fakta berita kepada pembacanya.

**Tabel 5**  
Framing Berita 2: —Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi!

Kategorisasi	—.... sejarah telah membuktikan bahwa kasus korupsi yang bergantian menimpa kader Golkar tidak serta-merta menggeser posisi Golkar sebagai partai papan atas di setiap pemilu. (p2) "Golkar sudah kebal ..... sudah imun terhadap korupsi. (p4) —.... kasus korupsi yang menjerat Azis Syamsudin dan Alex Noerdin .... kasus korupsi (pencetakan) Al Qur'an .... kasus korupsi KTP elektronik yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.... Kasus suap (yang melibatkan) Sekjen Partai Golkar Idrus Marhan .... (tetap saja menempatkan) Partai Golkar sebagai peraih kursi terbesar kedua di DPR RI. (penggalan kalimat yang teksnya tersaji dalam p1, p2, p3, p4, p5, p6, dan p7)
Ideologi	"Karena Golkar sudah berpengalaman .... sejak Orde Baru lalu .... (Golkar) sudah terbiasa dengan soal-soal kasus korupsi. Kalau partai lain akan terpuruk. (p9)
Rubrikasi	Menempatkan teks berita pada rubrik Nasional.
Klasifikasi	—.... kasus-kasus korupsi yang menimpa kader partai beringin memang memberi citra buruk pada partai tersebut, tetapi tidak berdampak banyak terhadap elektabilitas (Partai Golkar)!. (p8) —.... masyarakat semestinya dapat 'menghukum' partai-partai yang kadernya langganan korupsi dengan tidak memilihnya di pemilihan umum. (p14) Kalau memang masyarakat tidak ingin koruptor menjadi pejabat di Indonesia, ya begitu ada pejabat Indonesia atau petinggi partai politik yang partai politiknya korupsi, langsung kita hukum, kita jangan pilih, bahkan kita tinggalkan partai politik itu. (p16)

Source: Ramadhan (teks berita kompas.com, 27 September 2021)

Elemen *kategorisasi*. Pada tabel 5 dengan judul berita: —*Pengamat: Golkar Sudah Imun Terhadap Korupsi*, elemen kategorisasi terlihat pada p1 sampai p7. Ketujuh rangkaian narasi berita yang bersumber dari keterangan Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar digunakan sebagai fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep berita kompas.com, yakni menonjolkan *eksistensi Golkar sebagai partai senior yang mapan, namun para kadernya terus terjerat kasus Korupsi*. ‘Tujuan kategorisasi, agar narasi/pesan/makna berita *Golkar sebagai parpol korup*’ lebih mudah dipahami pembaca. Dari sisi bahasa, kategorisasi ini setidaknya dapat dimaknai dari tiga motif berikut: (a) tesis Golkar sebagai *parpol korup*’ tidak berarti Golkar terpuruk dalam perolehan suara di setiap pemilu; (b) tesis Golkar imun dari isu korupsi bermakna hilangnya sensitifitas kader atas isu korupsi; (c) parpol korup akan sulit menjadikan gerakan antikorupsi sebagai agenda kebijakan partai.

Elemen *ideologi* berita tersaji dalam p9, dimana Golkar dipersepsi sebagai parpol yang sarat pengalaman untuk urusan korupsi sejak era Orde Baru lalu. Secara simbolik, konstruksi teks berita merepresentasikan Golkar sebagai parpol pewaris gaya korupsi Orde Baru yang berwatak kolusif, koruptif, dan nepotik (KKN). Konstruksi ini mengafirmasi kajian semiotika Sibarani (2018) atas simbolitas parpol di Indonesia, bahwa warna kuning yang melekat pada simbol Partai Golkar dalam perspektif semiotika Jawa identik dengan *elitise kelas priyayi*’ dan *aset oligarki*’.

Elemen *rubrikasi* terkait kasus korupsi Partai Golkar oleh kompas.com ditempatkan dalam rubrik Nasional. Penempatan judul (dan narasi berita) pada rubrik Nasional tidak semata-mata dilatari oleh pertimbangan teknis redaksi, akan tetapi wujud pilihan alur cerita (framing) yang akan disajikan kompas.com untuk menggiring pembaca agar memaknai kasus korupsi Partai Golkar sebagai problem sosiologis, historis, dan ideologis. *Positioning* judul (dan narasi berita) pada rubrik Nasional juga tidak bisa dilepaskan kepentingan kompas.com dalam meraih dukungan publik melalui penekanan *statement* Ujang Komarudin, yang mengusung wacana kritis (*menyerang*’) sebagai konstruksi berita.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam p8: —*kasus korupsi yang menimpa kader partai beringin memang tidak berdampak banyak*

*terhadap elektabilitas Partai Golkar*, p14: “.... masyarakat semestinya „menghukum” partai-partai yang kadernya langganan korupsi dengan tidak memilihnya di pemilihan umum”, dan p16: —*Kalau memang masyarakat tidak ingin koruptor menjadi pejabat di Indonesia (seharusnya) langsung kita hukum, kita jangan pilih, bahkan kita tinggalkan partai politik itu*. Klasifikasi pemberitaan menunjukkan konstruksi diksi *menghukum*’ sebagai wacana *urgent* bagi publik. Penggunaan diksi *menghukum*’ adalah teknik klasifikasi yang memberi penonjolan pada Golkar sebagai parpol korup sebagai inti berita; menghadirkan citra negatif atas perilaku korup kader Partai Golkar—dengan tujuan membentuk opini publik agar *melek politik*’ dan *bersikap oposan*’ terhadap parpol korup sebagai cara menggiring opini publik. Per definisi, studi Ecker, dkk (2016) menemukan, bahwa pemilih lebih mengutamakan persepsi korupsi mereka dalam konteks di mana korupsi menjadi topik yang sangat menonjol (berada dalam kondisi parah), yang dibarengi oleh penegakan hukum yang kuat. Sebaliknya, pemilih akan memberi perhatian yang relatif kecil atas isu korupsi di mana korupsi dianggap masalah sepele dan proses penegakan hukumnya lemah.

**Tabel 6**  
Framing Berita 3: —Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

<i>Kategorisasi</i>	—KPK akhirnya menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. (p1) —Politisi asal Partai Golkar ini diduga terlibat kasus suap (sebesar Rp. 3,1 miliar) terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah kepada mantan penyidik KPK
<i>Ideologi</i>	Stepanus Robin Pattuju. Azis dijemput paksa, lantaran (beberapa kali) mangkir dari panggilan penyidik. Azis langsung digelandang dan ditahan KPKl. (p2, p3, dan p4). —Korupsi politik adalah ‘kejahatan kemanusiaan’ .... dilakukan oleh para pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya .... dalam upaya memperkaya diri sendiri atau menguntungkan, orang lain atau korporasil. (p17, p18, dan p, 20) —(dampak) korupsi politik lebih dahsyat dibanding korupsi biasa karena mengambil hak-hak rakyatl (p21)
<i>Rubrikasi</i>	Menempatkan teks berita pada rubrik Nasional.
<i>Klasifikasi</i>	—Kasus Azis menambah daftar panjang politisi yang terjerat kasus korupsi. (p15) —Sebelum Azis, KPK juga menangkap kasus korupsi Juliari, Edhy Prabowo, Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Hasto Kristiyanto (namun kasusnya gelap hingga kini), Setya Novanto, M. Romahurmuziy, Anas Urbaningrum, dan Luthfi Hasan Ishaq. (p5, p8, p12, dan p16)

Source: Margianto (teks berita kompas.com, 29 September 2021).

Elemen *kategorisasi*. Pada tabel 6 dengan judul berita: —*Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi*, elemen kategorisasi terlihat pada p1, p2, p3, dan p4. Rangkaian kalimat pada empat paragraf dijadikan fungsi abstraksi dari pikiran atau konsep penulisan berita, yakni peonjolan kalimat ‘*dijemput paksa*’ (Azis Syamsudin alias AS). Tujuan penggunaan diksi ‘*dijemput paksa*’ agar narasi dan isi berita yang disampaikan lebih mudah dipahami pembaca. Dari sisi bahasa, kategorisasi berita setidaknya memiliki dua makna: (a) makna ‘*dijemput paksa*’ sebagai wacana utama; (b) motif ‘*delegitimasi*’ pada partai Golkar yang kadernya terus tersandung kasus korupsi. Dari sisi bahasa, konstruksi kalimat juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk kegagalan Golkar dan pemerintah dalam menangani perilaku korup di tubuh parpol koalisi pendukung pemerintah. Diksi ‘*dijemput paksa*’—secara moral hukum—menunjukkan ada potensi AS untuk menghindari proses hukum. Sementara dari sisi politis, konstruksi berita ingin menyampaikan pesan pada publik bahwa parpol dan para kader pendukung utama pemerintah berwatak korup, dengan menempatkan penangkapan AS sebagai sarana konstruksi utama gagalnya agenda pemberantasan korupsi sebagai janji kampanye Presiden Jokowi.

Elemen *ideologi* terekam dalam rangkaian kalimat pada empat paragraf: ‘*korupsi*

politik adalah kejahatan kemanusiaan’, ‘*dilakukan oleh para pejabat*’, ‘*dampak korupsi politik lebih parah dari korupsi biasa*’, ‘*mengambil hak-hak rakyat*’. Rangkaian kalimat secara simbolik merepresentasikan kepentingan gagasan tertentu yang bisa dimaknai: (a) perbuatan yang merugikan nilai, martabat, dan hak-hak asasi manusia lain yang dilakukan secara terencana, meluas, dan sistematis—sejajar dengan kejahatan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, agresi, pemindahan penduduk secara paksa, pemenjaraan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan paksa, terorisme, dan apartheid (Vernon 2015);

(b). pejabat (negara) korup adalah pelaku aktif kejahatan kemanusiaan; (c) korupsi politik memberi pukulan telak bagi redistribusi keadilan, memperlebar disparitas distribusi aset nasional, dan menciptakan kemiskinan massal; (d) pejabat (negara) melakukan pencurian atas hak-hak rakyat secara sengaja. Keempat elemen ideologis berita ini penting untuk ‘*ditekankan*’ sebagai bentuk delegitimasi terkait wacana kinerja parpol dan pemerintah yang buruk dalam pengelolaan negara.

Elemen *rubrikasi* terkait kader parpol terlibat korupsi ditempatkan dalam rubrik Nasional. Pilihan kata (diksi) ‘*kegagalan pemerintah Jokowi*’ bukan semata pertimbangan teknis pemberitaan, Penempatan judul berita adalah bentuk pilihan strategis penyajian alur

cerita kompas.com untuk menggiring opini pembaca agar bertindak tegas dan sanggup menghukum parpol yang kadernya berlaku korup. *Positioning* judul berita juga bisa dimaknai sebagai strategi delegitimasi parpol melalui penggunaan *‘diksi aktif’* (menyerang perilaku korup pihak tertentu) dalam penyusunan fakta berita.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam p5, p8, p12, p15, dan p16. Penonjolan diksi *‘Kasus Azis menambah daftar panjang politisi yang terjerat kasus korupsi’* serta *‘kasus korupsi Juliari, Edhy Prabowo, Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Hasto, Novanto,*

Romy, Anas, dan Luthfi Hasan Ishaq’ digunakan kompas.com sebagai wacana inti (framing) dalam klasifikasi isi berita. Klasifikasi berita dapat diinterpretasi sebagai: (a) menggiring opini publik terkait kasus korupsi politik para kader parpol telah melahirkan citra negatif badan legislatif sekaligus mengafirmasi kegagalan pemerintahan dalam memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan membangun institusi negara yang bersih dan bebas KKN; (b) mendorong reaksi negatif (sikap oposisi) publik atas gaya permisif parpol dan pemerintah.

**Tabel 7**

Framing Berita 4: —Deretan Kasus Korupsi yang Lahir dari Dinasti Politikl

<i>Kategorisasi</i>	—Kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, memperpanjang daftar kasus korupsi .....l. (p1) —KPK menetapkan Dodi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di wilayahnya .....l. (p2) —.... pada September 2021 lalu, ayahnya, Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan) telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembangl. (p3)
<i>Ideologi</i>	—.... korupsi dinasti politikl (p1)
<i>Rubrikasi</i>	Menempatkan teks berita pada rubrik Nasional.
<i>Klasifikasi</i>	(Tempo menyusun data kasus korupsi pejabat yang melibatkan keluarganya atau korupsi yang dilanjutkan oleh anak, isteri atau kerabat pejabat tersebut) —Fuad Amin (Bupati Bangkalan 2003-2012) tersangka kasus pencucian uang yang juga menyeret anak dan istri Fuadl (p5); —Syaukani H.R (Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010) tersangka korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara (p6) dan anaknya, Rita Widyasari (yang mengisi jabatan Syaukani pada tahun 2010, juga terjerat kasus korupsi— (p7); —Yan Anton Ferdian (Bupati Banyuasin 2013- 2018) tersangka suap terkait proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Anton adalah anak dari Amiruddin Inoed, yang merupakan Bupati Banyuasin sebelum dirinyal (p8); —Sri Hartini (Bupati Klaten 2016-2021) tersangka dugaan suap uang setoran dari para PNS terkait promosi jabatan. Suaminya, Haryanto (Bupati Klaten 2000-2005), juga pernah terjerat kasus korupsi buku ajar pada tahun 2004 silaml (p9); —Atty Suharti (Walikota Cimahi 2012-2017) tersangka kasus suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017. Atty merupakan Walikota yang menggantikan suaminya, Itoc Tochija. Keduanya ditangkap pada 2017l (p10); Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten 2007-2017). Dinasti politik Atut adalah yang paling terkenal, dan melahirkan sejumlah perkara korupsi politik di Banten, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemprov Banten Tahun 2011-2013, hingga perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi RII (p11, p12); —Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo 2013- 2021) ditangkap KPK pada Agustus 2021 lalu. Puput ditangkap bersama suaminya, Hasan Aminuddin (anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem; mantan Bupati Probolinggo 2003- 2013). Puput ditangkap KPK atas dugaan perkara jual beli jabatan kepala desal. (p13)

Source: Adyatama (teks berita tempo.co, 17 Oktober 2021).

Elemen *kategorisasi*. Pada tabel 7 dengan judul berita: —*Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsil*, elemen kategorisasi terlihat pada p1, p2, dan p3. Kategorisasi dijadikan fungsi abstraksi pikiran

(konsep) penulisan berita, yakni menonjolkan narasi dua politisi yang berstatus ayah dan anak, yang keduanya berasal dari Partai Golkar, dan keduanya terjerat kasus korupsi. Penggunaan diksi *‘menyeret’* dan *‘memperpanjang daftar kasus korupsi’* sepertinya ditujukan

untuk menyentuh aspek kognisi dan psikis pembaca: (a) pola korupsi politik tumbuh subur dalam keluarga politisi; (b) korupsi politik adalah produk politik dinasti yang melekat dalam kultur politik feodalisme. Dari sisi bahasa, kategorisasi berita setidaknya juga bisa dimaknai sebagai: (a) penangkapan Dodi adalah bukti buruknya politik dinasti berwatak feodal dalam sistem demokrasi Indonesia pasca reformasi; dan (b) diksi *‘menyeret’* dan *‘memperpanjang’* bisa bermakna bahwa korupsi politik sudah sangat darurat, parah, dan keterlaluan. Penggunaan diksi (kalimat aktif) ini menunjukkan *‘kegeraman’* tempo.co saat menulis perilaku koruptif dinasti politik yang intensitasnya kian mengkhawatirkan.

Elemen *ideologi* dalam teks berita tersaji dalam p1, yakni: *‘korupsi politik dinasti’*. Konstruksi ideologis yang digunakan sebagai wacana inti berita ini sangat vital untuk ditekankan karena secara simbolik merepresentasikan motif ideologis politik dinasti, yakni politik dinasti terkait dengan penguasaan dan kontrol dalam distribusi kekuasaan serta manfaat ekonomi yang secara politik telah ditentukan.

Konsep politik dinasti menyebut, politik dinasti tidak akan membiarkan pesaing politik (yang datang dari luar kelompoknya) mengambil *‘jatah’* ekonomi-politik mereka. Dinasti politik akan menggunakan segala modus dan cara untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewanya. Alokasi jabatan politik dalam setiap momentum pemilu (dan distribusi jabatan politik) akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan posisi-posisi politik anggota keluarga atau kerabat dekat (Adan 2018).

Elemen *rubrikasi* terkait *‘korupsi dinasti politik’* dimuat dalam rubrik Nasional. Penempatan judul berita di rubrik Nasional tentu dilatari oleh pertimbangan redaksi, bahwa korupsi model politik dinasti adalah alur cerita yang isunya tak hanya berskala nasional, dipahami pembaca, namun juga digunakan sebagai sarana penggiringan opini publik agar memaknai korupsi politik dinasti sebagai musuh bersama. Positioning ini juga tidak bisa dilepaskan dari pesan simbolik redaksi kepada institusi penegak hukum agar lebih tegas dan bernyali dalam menghadapi politik dinasti di tingkat lokal yang berwatak korup, sekaligus sebagai upaya redaksi untuk meraih dukungan/simpatik publik melalui framing berita yang telah diracik sedemikian rupa dan disajikan sebagai fakta berita.

Elemen *klasifikasi* terdapat dalam 7 paragraf (p5 hingga p13) yang menarasikan secara cukup rinci para politisi dan elite pimpinan daerah korup, lengkap dengan jenis korupsi (barang/jasa) yang dilakukannya. Klasifikasi berita sebagai bentuk penonjolan digunakan tempo.co sebagai inti dari narasi politik dinasti sebagai framing utama berita. Klasifikasi berita bisa dimaknai bahwa: (a) korupsi politik adalah jenis kejahatan yang sulit diberantas dalam format politik dinasti; (b) politik dinasti adalah wujud pelanggaran etis dalam kehidupan politik; (c) politik dinasti adalah penghambat nyata tumbuhnya budaya politik demokratis; (d) fenomena korupsi politik yang berjaln-kelindan dengan eksistensi politik dinasti adalah bukti telah rusaknya sistem demokrasi Indonesia pasca reformasi.

## SIMPULAN

1. Teks berita 1 (tempo.co). Elemen *kategorisasi*: biaya politik yang mahal adalah biang keladi dari praktik korupsi politik. Elemen *ideologi*: biaya politik yang mahal adalah bentuk penghancuran demokrasi dan eksistensi parpol. Elemen *rubrikasi*: menempatkan berita korupsi politik sebagai isu nasional. Elemen *klasifikasi*: ada unsur resistensi terhadap kasus koruptif politik, dan ada unsur solusi terkait pembenahan sistem. Tekanan klasifikasi ditujukan untuk membentuk sikap oposisi (*public resistance*) pada parpol korup yang telah merusak demokrasi dan sistem politik negara.
2. Teks berita 2 (kompas.com). Elemen *kategorisasi*: kendati terstigma sebagai *‘parpol korup’*, namun tidak berarti Golkar terpuruk dalam perolehan suara pemilu. Elemen *ideologi*: perilaku korup kader Partai Golkar adalah problem sosiologis, historis, dan ideologis. Elemen *rubrikasi*: Menempatkan Golkar sebagai pewaris gaya korupsi Orde Baru yang berwatak kolusif, koruptif, dan nepotik (KKN). Elemen *klasifikasi*: diksi *‘menghukum’* sebagai wacana inti; teknik klasifikasi (penonjolan) pada Golkar sebagai parpol korup; menghadirkan citra negatif atas perilaku koruptif kader Partai Golkar; menggiring opini agar publik bersikap oposan pada parpol berwatak korup.
3. Teks berita 3 (kompas.com). Elemen *kategorisasi*: delegitimasi pada partai Golkar; gagalnya agenda pemberantasan korupsi. Elemen *ideologi*: korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan. Elemen *rubrikasi*: memberi tekanan penggunaan *‘diksi aktif’* (menyerang perilaku korup) dalam penyusunan fakta

berita. Elemen *klasifikasi*: mengafirmasi kegagalan pemerintahan dalam memberantas korupsi; mendorong reaksi negatif dan sikap oposisi publik atas parpol dan pemerintah.

4. Teks berita 4 (tempo.com). Elemen *kategorisasi*: penggunaan diksi *menyeret* dan untuk menyentuh aspek kognisi dan psikis pembaca; korupsi politik adalah produk politik dinasti berciri feodal; korupsi politik sudah sangat darurat, parah, dan keterlaluhan. Elemen *ideologi*: politik dinasti sebagai ideologi elite feodal. Elemen *rubrikasi*: *positioning* berita korupsi dinasti politik sebagai alur cerita yang disajikan pada rubrik nasional. Elemen *klasifikasi*: narasi rinci perilaku korup para politisi dan elite pimpinan, lengkap dengan jenis kejahatan korupsi (barang/jasa) yang dilakukannya.

Kajian ini merekomendasi pada khalayak pembaca untuk bersikap kritis dalam menyimpulkan isi pemberitaan media. Untuk wartawan, pengelola, dan praktisi media, penelitian ini merekomendasikan agar menyajikan kasus-kasus korupsi politik secara lebih faktual, objektif, dan peresisif, tidak memframing berita secara berlebihan (berpihak, bias, subjektif), karena wartawan memiliki tanggung jawab sosial pada publik pembaca untuk menyajikan pemberitaan yang senafas dengan etika dan prinsip kerja jurnalistik profesional yang adil, berimbang (*cover both side*), dan tidak memihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adan, W.R. (2018). —Turning point: Political dynasty, corruption and poverty [online] Retrieved December 7, 2018. <https://www.mindanews.com/mindaviews/2018/12/turning-point-political-dynasty-corruption-and-poverty/> (Accessed: October 19, 2021).
- Adyatama, E. (2021) —Deretan Kasus Korupsi yang Lahir dari Dinasti Politik [online] Retrieved October 17, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1518304/deretan-kasus-korupsi-yang-lahir-dari-dinasti-politik> (Accessed: October 16, 2021).
- Affinanto, D.K. (2018) Pembingkaian berita kasus suap Patrialis Akbar di harian Kompas: Analisis framing Robert N. Entman harian Kompas edisi Januari- Februari 2017 (*Unpublished Undergraduate Thesis*) [online] Retrieved from <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1931/1/donix%20kurniawan%20affinanto.pdf> (Accessed: October 23, 2021).
- Alkotsar, A. (2009) Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern (Telaah tentang praktik korupsi politik dan penanggulangannya). *Ius Quia Iustum*, Edisi Khusus, Vol. 16: 2009: 155-179. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>.
- Althusser, L. (2018) *Ideology and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation)* [online]. Retrieved from <https://mforbes.sites.gettysburg.edu/cims226/wp-content/uploads/2018/09/Week-3b-Louis-Althusser.pdf> (Accessed: October 19, 2021).
- Antara (2021) —Fahri Hamzah: Biaya Politik yang Mahal Lahirkan Praktik Korupsi [online] Retrieved September 5, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1502561/fahri-hamzah-biaya-politik-yang-mahal-lahirkan-praktik-korupsi> (Accessed: October 16, 2021).
- Ardisasmita, M.S. (2006) —Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan *E-Announcement* untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. *Makalah Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (KPPU, 23 Agustus 2006) [online] Retrieved from <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf> (Accessed: October 8, 2021).
- Bayu, D.J. (2020) —Penggelapan Dana Jadi Modus Korupsi Terbanyak selama Semester I 2020 [online] Retrieved September 30, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/penggelapan-dana-jadi-modus-korupsi-terbanyak-selama-semester-i-2020> (Accessed: October 16, 2021).
- Bland, B. (2020). *Man of contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia*. Melbourne: Penguin Books.
- Bobi, K. (2020) —KPK: 397 Pejabat Politik Terjerat Kasus Korupsi [online] Retrieved September 30, 2020. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/349013/kpk-397-pejabat-politik-terjerat-kasus-korupsi> (Accessed: October 12, 2021).
- Bond, F.F. (1961) *An introduction to journalism: A survey of the fourth estate in all its forms* (2nd Edition). New York: The Mac Milan

- Company.
- Burton, G. (2005) *Media and society: Critical perspectives*. New Delhi: Rawat Publication.
- Creswell, J.W. (2014) *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durham, F.D. (2006) News frames as social narratives: TWA Flight 800. *Journal of Communication*, 48(4): 100-117. Retrieved from <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02772.x>.
- Ecker, A. et. al. (2016). "Why voters do not (always) punish government parties for corruption" [online] Retrieved May 17, 2016. <https://www.democraticaudit.com/2016/05/17/why-voters-do-not-always-punish-government-parties-for-corruption/>
- Edelman, M. (1993) Contestable categories and public opinion. *Journal Political Communication*, 3(10): 231-242. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962981>.
- Eriyanto (2011). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.
- Green, P. & Ward, T. (2004) *State crime: Governments, violence and corruption*. London: Pluto Press.
- Hamad, I. (2007) Lebih dekat dengan analisis wacana. *Jurnal Mediator*, 8(2): 325-344. Retrieved from <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1252>
- Hamzah, A. (1991) *Korupsi di Indonesia dan pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, D.N. (2003) *Paradigma dan metodologi penelitian sosial empirik klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Hidayat, D.N. (2002) Metodologi penelitian dalam sebuah *'multi-paradigm science'*. *Jurnal Mediator*, 3(2): 197-219. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/766>.
- ICW (2018) —Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemilu 2018 dan 2019— (p. 1-8). [online] Retrieved January 10, 2018. May 4, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-cenderung-alami-peningkatan-sejak-2016> (Accessed: October 16, 2021).
- Klitgaard, R. (1998) *Membasmi korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurlantzick, J. (2021) —Jokowi and the Missed Promises: Part 1 [online] Retrieved October 8 2021. <https://www.cfr.org/blog/jokowi-and-missed-promises-part-1> (Accessed: October 22, 2021).
- Lubis, M. & Scoot, J.C (1995) *Bunga rampai korupsi*. Jakarta: LP3ES dan Obor.
- Margianto, H. (2021) —Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi [online] Retrieved September 29, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/29/09051101/menghukum-parpol-yang-kadernya-terlibat-korupsi?page=all> (Accessed: October 16, 2021).
- tahun 2009 dan 2012. (Unpublished Dissertation) [online] Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-20364586.pdf> (Accessed: October 22, 2021).
- Jayani, D.H. (2021) —ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Cenderung Alami Peningkatan sejak 2016 [online] Retrieved
- Mosco, V. (1996) *The political economy of communication-rethinking and renewal*. London: SAGE Publications.
- Novita, D. (2016) Konstruksi media dalam memberitakan politisi perempuan yang terlibat korupsi (Analisis framing kritis pemberitaan harian umum Kompas terhadap kasus korupsi Angelina Sondakh). *Jurnal AKP*, 2(6): 73-103. Retrieved from <https://doi.org/10.33558/akp.v6i2.589>.
- Neuman, W.L. (2016) *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif*. Edisi ke-7 (Terjemahan). Jakarta: Indeks.
- Political Corruption Law and Legal Definition [online] Retrieved from <https://definitions.uslegal.com/p/political-corruption/> (Accessed: October 15, 2021).
- Portal Webl [online] [https://id.wikipedia.org/wiki/Portal\\_web](https://id.wikipedia.org/wiki/Portal_web) (Accessed: October 23, 2021).
- Power, T.P. (2018) Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3): 307-338. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074918.2018.1549918>.
- Prasodjo, E. (2011) —Republik Tersandera Korupsi [online] Retrieved January 24, 2011. <https://antikorupsi.org/id/article/republik-tersandera-korupsi> (Accessed: October 13, 2021).
- Prawiradiredja, S. (2017) Analisis pemberitaan operasi tangkap tangan KPK.



- Naskah Penelitian Mandiri Dosen Universitas Dr. Soetomo [online] Retrieved July 10, 2007. <http://repository.unitomo.ac.id/450> (Accessed: October 22, 2021).
- ProgressTech (2018). —8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya. [online] Retrieved May 18, 2017. <https://www.slideshare.net/progresstechid/jenisjenis-media-sosial-perkembangannya> (Accessed: October 23, 2021).
- Rahardjo, M. (2018) Paradigma Interpretif [online] Retrieved from <http://repository.uinmalang.ac.id/2437/1/2437.pdf> (Accessed: October 23, 2021).
- Ramadhan, A. (2021) —Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi [online] Retrieved September 27, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/10222171/pengamat-golkar-sudah-imun-terhadap-korupsi?page=all> (Accessed: October 16, 2021).
- Rivaldi, S.A. (2017) Korupsi dalam konstruksi media: Analisis wacana kritis pemberitaan korupsi di televisi swasta nasional TV One dan Kompas TV (*Unpublished Postgraduate Thesis*) [online] Retrieved from <https://lib.unnes.ac.id/27031/> (Accessed: October 24, 2021).
- Romli, A.S.M. (2012) *Jurnalistik online: Panduan praktis mengelola media online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sibarani, R. (2018) Indonesia's political colours: From the new order to Joko Widodo. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2): 189-202. Retrieved from <https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.1696>.
- Sinaga, F.A. (2019) Bentuk-bentuk korupsi politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1): 59-75. Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/256>.
- Sitompul, P. (2014) Konstruksi realitas peran KPK dalam pemberitaan online terkait kasus korupsi (Studi framing beberapa pemberitaan online terkait peran KPK pada kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 18(2): 169-181. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2014.180203>.
- Sobur, A. (2015). *Analisis teks media: Suatu pengantar analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Cetakan ke-12. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwarni, E. (2018) Penegakan Hukum atas Korupsi Politik (Review Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang). 4(3): 953-966 [online] Retrieved <https://journal.unnes.ac.id/sju/indeks.php/sn/view/27105>.
- Tamburaka, A. (2012) *Agenda setting media massa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tuchman, G. (1978). *Making news: A study in the construction of reality*. New York: The Free Press.
- Vernon, R. (2015) —Crime Against Humanity (*Encyclopedia Britannica*) [online] Retrieved August 17, 2015. <https://www.britannica.com/topic/crime-against-humanity> (Accessed: August 21, 2021).
- Wahyuni, H.I. (2000) Relasi media-negara-masyarakat dan pasar dalam era reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2): 197-220. Retrieved from <https://doi.org/10.22146/jsp.11120>.
- Ikbar, Y. (2012) *Metode penelitian kualitatif: Panduan membuat tugas akhir/karya ilmiah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jamil, A. (2014) Gerakan sosial dalam perspektif framing: Studi pembentukan proses dan pertarungan framing pada gerakan sosial sengketa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri
- Widjojanto, B. (2017) Relasi korupsi korporasi dan korupsi politik: Kajian awal melacak korupsi politik di korporasi. *Integritas*, 1(3): 31-52. Retrieved from <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.139>.
- Widoyoko, J.D. (2018). Politik, patronase dan pengadaan: Studi kasus korupsi proyek Wisma Atlet. *Integritas*, 4(2): 1-23. Retrieved from <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.200>